

Laporan Penelitian
PENELITIAN KURIKULUM DAN PERBUKUAN



**PENGEMBANGAN KURIKULUM DIVERSIFIKATIF DAN PARTISIPATORIS
SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENUJU NAWACITA**

Tim Peneliti:

Dr. Sugeng Bayu Wahyono, M.Si

Dr. Ali Muhtadi, M.Pd

Deni Hardianto, M.Pd

Suyantiningsih, M.Ed

Isniatun Munawaroh, M.Pd

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2017

Executive Summary

**PENGEMBANGAN KURIKULUM DIVERSIFIKATIF DAN
PARTISIPATORIS SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN MENUJU NAWACITA**

Tim Peneliti:

Dr. Sugeng Bayu Wahyono, M.Si

Dr. Ali Muhtadi, M.Pd

Dr. Budiana Setiawan

Deni Hardianto, M.Pd

Suyantiningsih, M.Ed

Isniatun Munawaroh, M.Pd

Sucipto

Zulfikri Anas

KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAN PUSLITJAKDIKBUD

TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah meyakini bahwa untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, terutama harus ditempuh melalui pembangunan pendidikan. Dokumen politik seperti Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional adalah wujud komitmen pemerintah untuk pembangunan pendidikan yang terarah dan terpadu dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sejak Indonesia merdeka terus berusaha mengeluarkan kebijakan pada sektor pendidikan agar mampu menjadi modal dasar bagi upaya membangun bangsa yang sejahtera dan berdaya saing tinggi dalam percaturan dunia. Mulai dari aspek kuantitatif dengan kebijakan bertumpu pada pemerataan layanan pendidikan, hingga aspek kualitatif yang terus meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam pemerintah Jokowi/JK juga telah berkomitmen tinggi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang ditempuh melalui serangkaian kebijakan. Salah satu pedoman utama dalam pembangunan sektor pendidikan adalah dokumen politik Nawacita. yang meliputi: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan

program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; dan (9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Memperhatikan sembilan pedoman nasional sebagaimana tercantum dalam Nawacita tersebut, pembangunan sektor pendidikan menempati posisi strategis, termasuk di dalamnya persoalan bagaimana mengembangkan kurikulum yang historis dan sesuai dengan konteks sosio kultural. Bahkan jika melihat keterkaitan dengan butir Nawacita yang lain, maka pengembangan kurikulum di kawasan pinggiran untuk menciptakan “Indonesia Pintar” dan “Indonesia Sejahtera” terasa lebih strategis. Oleh karena itu bagaimana mengembangkan kurikulum yang senafas dengan prinsip pembangunan yang bergerak dari pinggir adalah penting segera dilakukan untuk mewujudkan Nawacita.

Akan tetapi mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah. Sudah lebih dari 64 tahun merdeka, negara ini masih terus didera masalah ketimpangan kualitas pendidikan, antara desa kota, pusat pinggiran, Jawa luar Jawa, sekolah negeri dan swasta, termasuk antara masyarakat miskin dan kaya yang terus menganga. Beberapa variabel yang mempengaruhi fenomena kesenjangan itu Dalam pada itu isu di seputar persoalan kurikulum yang masih sentralistik, bias perkotaan yang merupakan masyarakat industrial, dan kurang memperhatikan masyarakat pinggiran masih terasa fenomenal.

Memang pemerintah selama ini telah melakukan berbagai perubahan kurikulum mulai dari kurikulum 1994 yang mengakomodir muatan lokal, Kurikulum 2004 rintisan dikenalkan kurikulum berbasis kompetensi, Kurikulum 2006 yang populer dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 berbasis rekonstruksi

sosial yang menekankan pada proses pembelajaran, dan hingga kurikulum berbasis KKNI terutama di perguruan tinggi. Akan tetapi perhatian terhadap upaya mengembangkan SDM di daerah pinggiran, perbatasan, dan berorientasi pada pengembangan potensi masyarakat yang berbudaya maritim belum dilakukan secara serius. Memang harus diakui bahwa pemerintah selama ini telah berupaya meningkatkan SDM berkultur maritim dengan mendirikan beberapa SMK Kelautan yang diletakan di wilayah nelayan. Namun sebegitu jauh implementasinya, di samping terdapat hasil yang cukup memadai dalam meningkatkan kualitas SDM di seputar wilayah nelayan, tetapi juga menyodorkan masalah sebagai konsekuensi kurikulum yang sudah terpaket dari pusat. Proses pembuatan kurikulum kurang melibatkan partisipasi masyarakat nelayan setempat sehingga kurang mampu mengembangkan budaya maritim yang lebih historis dan sesuai dengan konteks sosio-kulturalnya.

Dalam pada itu, pendidikan merupakan proses yang bertugas mengembangkan potensi fisik, mental, dan moralitas manusia agar terus mampu beradaptasi pada lingkungan yang terus berubah. Berangkat dari asumsi ini, maka proses pendidikan senantiasa mempersiapkan peserta didik agar cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Oleh karena itu perubahan kurikulum pada satuan pendidikan adalah sebuah keniscayaan pula. Pada posisi inilah maka pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan terasa tinggi nilai urgensinya untuk mewujudkan Nawacita. Berangkat dari argumen strategis tersebut, maka penelitian tentang pengembangan kurikulum diversifikatif dan partisipatoris dalam kebijakan pendidikan terasa tinggi nilai urgensinya. Beberapa teori yang dipilih untuk menganalisis data temuan penelitian ini antara lain teori partisipasi dan *centering the margine*, serta kurikulum diversifikatif.

Pembangunan pada suatu wilayah erat kaitannya dengan partisipasi warga sekitar, karena itu kosep partisipasi menjadi penting untuk memperoleh penjelasan teoretik. Partisipasi, sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian itu, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri. Artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk

memperkuat demokrasi deliberatif. Sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat menuju terjadinya transformasi kultural, yaitu suatu kebudayaan partisipasi warganegara yang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dalam pengertian ini partisipasi adalah alat dan juga sekaligus tujuan (Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2006).

Sementara itu Arnstein (1979) mengusulkan model pembangunan partisipasi berusaha memperjelas kerumitannya dan dari berbagai tafsir yang bias kepentingan selama ini. Ia menyusun konsep partisipasi ke dalam yang disebut sebagai "tangga partisipasi warga negara", yang susunannya sebagai berikut:

Demokrasi, partisipatif deliberatif	Kontrol Warga Negara	}	Derajat kekuatan warga negara
	Kekuasaan didelegasikan		
Demokrasi representatif	Kemitraan	}	Derajat Tokenisme
	Menenangkan		
	Konsultasi		
Eksplotasi	Menginformasikan	}	Non-partisipasi
	Terapi		
	Manipulasi		

Sumber: Sumber: Ife dan Tesoriero, 2006, hal. 299

Hortstmann dan Wadley (2006) dalam kata pengantar buku *Centering the Margin: Agency and Narrative in Southeast Asian Borderlands* menjelaskan bahwa dinamika sosial yang terjadi di perbatasan justru akan semakin menentukan kelangsungan negara-bangsa di masa depan. Dalam prinsip *centering the margin*, menjadikan awal perbatasan sebagai titik perubahan bergerak secara dinamis ke arah pusat, sehingga titik kekuatan sebuah negara ada dalam bingkainya yang berwujud kuatnya pertahanan di daerah perbatasan baik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kebijakan seperti itu maka masyarakat nelayan yang terpinggirkan dan sektor kelautan yang senantiasa tidak diprioritaskan akan menjadi pusat perhatian dalam dinamika pembangunan nasional.

Nana S Sukmadinata (2004) mendefinisikan Diversifikasi kurikulum sebagai pelayanan pendidikan dengan cara menyesuaikan, memperluas, dan memperdalam kompetensi dan materi pelajaran dalam rangka untuk melayani keberagaman penyelenggaraan satuan pendidikan, kebutuhan serta kemampuan daerah dan sekolah

ditinjau dari segi geografis, budaya, serta kemampuan, kebutuhan dan minat serta potensi peserta didik. Diversifikasi kurikulum yang melayani minat peserta didik dan kebutuhan daerah dirancang oleh daerah dan sekolah. Diversifikasi kurikulum juga dilaksanakan untuk melayani peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena adanya kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, hal ini juga disebut dengan istilah kurikulum adaptif/akomodatif. Diversifikasi kurikulum juga perlu dilaksanakan untuk melayani peserta didik dari daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah utama penelitian ini yaitu, bagaimana mengembangkan model desain kurikulum deversifikatif dan partisipatif yang sesuai dengan potensi daerah dan kondisi sosio-kultural masyarakat setempat. Agar supaya lebih spesefik dan memudahkan perumusan kebijakan, maka rumusan masalah di rinci sebagai berikut:

- a. Bagaimana mengembangkan model desain kurikulum deversifikatif dan partisipatif pada daerah berbasis kebudayaan agraris yang melibatkan satuan pendidikan dan peserta didik?
- b. Bagaimana mengembangkan model desain kurikulum deversifikatif dan partisipatif pada daerah berbasis kebudayaan maritim yang melibatkan satuan pendidikan dan peserta didik?
- c. Bagaimana mengembangkan model desain kurikulum deversifikatif dan partisipatif pada daerah beranda depan (perbatasan) yang melibatkan satuan pendidikan dan peserta didik?

3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis informasi dan data untuk menghasilkan model desain kurikulum deversifikatif dan partisipatif pada daerah berbasis kebudayaan agraris yang melibatkan satuan pendidikan dan peserta didik.
- b. Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis informasi dan data untuk menghasilkan model desain kurikulum deversifikatif dan partisipatif pada daerah berbasis kebudayaan maritim yang melibatkan satuan pendidikan dan peserta didik.
- c. Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis informasi dan data untuk menghasilkan model desain kurikulum deversifikatif dan partisipatif pada daerah beranda depan (perbatasan) yang melibatkan satuan pendidikan dan peserta didik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan (R & D) dengan menadaptasi dari model Borg & Gall (2003) yang ditujukan untuk mengembangkan Kurikulum Diversifikatif dan Partisipatoris sebagai Implementasi Kebijakan Pendidikan Menuju Nawacita. Penelitian menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) studi pendahuluan untuk melakukan analisis data sekunder model kurikulum yang akan dikembangkan termasuk masukan para pakar, (2) verifikasi data dan pengumpulan data pengembangan desain kurikulum Diversifikatif dan Partisipatoris, (3) Pengolahan dan analisis data serta (4) penyusunan laporan; rekomendasi kebijakan; dan seminar. Penelitian ini dilakukan di 3 lokasi yaitu: (1) SMK I Bawen Semarang Propinsi Jawa Tengah, (2) SMK Natuna Propinsi Kepulauan Riau, dan (3) SMK Maksar Propinsi Sulawesi Selatan.

C. TEMUAN PENELITIAN

Terdapat beberapa temuan penting terkait dengan kurikulum di tiga lokasi penelitian, secara rinci sebagai berikut:

1. Kurikulum SMK Berbasis Kultur Agraris

Kurikulum merupakan dokumen strategis bagi upaya pembentukan kompetensi baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Terlebih lagi jika itu melalui sebuah institusi pendidikan yang bernama sekolah, yang selama ini menjadi andal dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Tidak terkecuali lembaga sekolah vokasi seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang di Indonesia memang berada dalam posisi strategis membentuk kompetensi berketerampilan tinggi untuk memenuhi dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Demikian pula SMK 1 Bawen Kabupaten Semarang yang merupakan lembaga sekolah vokasi bertujuan membentuk SDM mumpuni di bidang pertanian. Konsentrasi pada bidang pertanian ini menyesuaikan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Bawen dan sekitarnya yang merasakan berkultur agraris.

SMK 1 Bawen ini menurut Ir. Jumeri, Kepala Sekolah, selama ini telah menjadi induk kegiatan yang membawahi SMK dan lembaga sekolah lain yang konsentrasi pada bidang pertanian. Menempatilahan seluas 14 ha berada di lereng pegunungan Bandungan dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Dalam sepuluh tahun terakhir

animo masuk SMK pertanian semakin meningkat, bahkan untuk jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP) menerima 9 rombel pada setiap tahunnya. Meningkatnya animo ini menjadi sangat menggembirakan karena justru terjadi pada saat ketika kalangan anak muda mulai meninggalkan sektor pertanian. “Boleh jadi juga karena biayanya murah sehingga animo masyarakat juga meningkat”, ungkap Jumeri dalam FGD bulan November 2017.

Namun demikian, seiring mulai menurunnya sektor pertanian dalam pembangunan, lulusan SMK Pertanian Bawen ini banyak juga yang tidak memilih profesi di bidang pertanian. Mereka lebih suka masuk ke sektor industri non-pertanian karena merasa lebih bergengsi. Pilihan lulusan SMK ini lebih banyak ke industri garmen, dan ironisnya didukung oleh institusi keluarganya. Banyak orangtua mereka justru melarang menekuni bidang pertanian, karena bekerja di sektor pertanian merupakan kemunduran. Berkembang persepsi di kalangan para orangtua murid bahwa menjadi petani adalah rendah dan menyedihkan. “Kalau lulus SMK kemudian menjadi petani, ya mendingan tidak usah saya sekolahkan. Karena jadi petani itu tidak enak, tidak bergengsi, dan hasilnya sedikit”, begitu kata petani dalam satu kesempatan FGD di desa Jimbaran tidak jauh dari lokasi SMK tersebut.

Jadi tesis utama konsep kurikulum diversifikatif dan partisipatoris bahwa kurikulum harus menyesuaikan dengan potensi daerah sekitar dan kondisi sosiokulturalnya justru mendapat hambatan kultural juga. Dalam pandangan masyarakat sekitar Bawen yang berkultur agraris justru tidak ingin anak-anaknya menjadi petani karena berdasarkan pengalaman mereka menjadi petani itu tidak enak dan kurang mendapat apresiasi. Bahkan yang lebih untung adalah menjadi tengkulak, karena justru merekalah yang kaya-raya bergerak dalam bisnis komoditi pertanian. Sementara petani produsen sendiri yang bekerja keras, tetapi hasilnya tidak seberapa. Oleh karena itu, ketika para petani ini diminta berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum rata-rata mereka tidak bersedia. Para petani tidak merasa bahwa pengetahuan mereka adalah sangat diperlukan untuk pengembangan kurikulum diversifikatif dan partisipatoris. “Kalau urusan kurikulum itu ya urusannya kepala sekolah dan para guru. Kalau belajar itu ya rusannya sekolahan, urusannya negara, dan saya manut saja apa maunya sekolah”, katadalam FGD bulan November 2017 di desa Jimbaran.

Sementara itu menurut keterangan Kepala Sekolah SMK Bawen, Jumeri, selama ini memang tidak ada program pengembangan kurikulum yang melibatkan partisipasi masyarakat. Di samping pihak sekolah sendiri tidak pernah terlibat, karena kurikulum sudah given dari atas atau sentralistik, maka pihak sekolah sendiri hanya melaksanakan begitu saja kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah. Yang dilakukan sekolah hanyalah sekedar mengubah metode pembelajarannya, itu pun sangat terbatas.

Meskipun demikian, menurut Jumeri pihak sekolah terus berusaha menyesuaikan dengan keinginan DUDI sekiranya apa yang diharapkan mereka. Selama ini berdasarkan pengalamannya, ada beberapa penambahan jam matapelajaran, seperti matematika yang disamakan jamnya dengan SMK. Penambahan itu menurut Jumeri berangkat dari keluhan DUDI bahwa kemampuan berlogika dan kecerdasan dalam melakukan pekerjaan, antara lulusan SMK dan SMA lebih bagus lulusan SMA. “Jadi dalam konteks pengembangan kurikulum diversifikatif, yang terjadi justru lebih universalisti disamakan dengan kurikulum SMA”, kata Jumeri.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Moh. Hisyam, guru SMK I Bawen yang menjelaskan bahwa kalau mau jujur sebenarnya yang lebih diversifikatif itu kurikulum 1994. Kurikulum ini jauh lebih memberikan peluang bagi SMK untuk mengembangkan kompetensi psikomotoriknya. Murid lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk mengasah keterampilan sesuai dengan tujuan setiap mata pelajaran vokatif. Lebih lanjut Hisyam menuturkan sebagai berikut:

“Sekarang ini kurikulum SMK banyak titipan, seperti materi anti korupsi, kebangsaan, dan lain-lain yang justru mengurangi peluang bagi siswa SMK untuk mengasah keterampilan. Kompetensi psikomotorik itu yang paling penting adalah frekuensi atau tingkat keseringan berlatih keterampilan sesuai tujuan mata pelajaran vokatif. Akan tetapi karena ada penambahan pembentukan kompetensi non keterampilan, maka otomatis frekuensi berlatih dalam pelajaran praktik juga berkurang signifikan.”

Situasi seperti itu dipersulit lagi ketika tiadanya kontrol dari negara tentang bagaimana pemanfaatan SDM dari sekolah vokasi, semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Sudah tentu jika lulusan SMK akan kalah dengan lulusan SMA, karena DUDI biasanya lebih memilih lulusan SMK. Seharusnya ada kebijakan dari pemerintah yang mengontrol pasar tenaga kerja ini melalui kebijakan afirmatif yang melindungi lulusan SMK. “Kalau tidak

kurikulum SMK pasti akan menyesuaikan permintaan DUDI yang lebih menyukai kecerdasan bukan aspek keterampilannya, sehingga kurikulum kurang diversifikatif”, kata Hisyam.

Para guru SMK mengakui bahwa kurikulum SMK memang kurang cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan actual pasar kerja. Salah satu sebabnya kurikulum masih bersifat sentralistik sehingga dan birokratik harus melalui prosedur panjang jika harus mengubah secara cepat menyesuaikan perkembangan tuntutan pasar. Ini berbeda dengan SMK Teresia di Semarang yang cepat mengikuti tuntutan perkembangan. Ketika di terjadi buming permintaan strubbery dan Bungan Cresian misalnya, maka SMK Teresia langsung mengubah kurikulumnya yang bermuatan budidaya kedua komoditas tersebut. “Kalau di SMK Teresia itu cepat berubah kurikulumnya menyesuaikan dinamika pasar komoditas pertanian”, kata Bambang peserta FGD di Jimbarang.

2. Kurikulum SMK Berbasis Kultur Maritim

Kultur maritime di daerah Makasar sudah mulai luntur hal ini terungkap bahwa, anak-anak sekolah SD yang kurang berminat untuk menjadi nelayan, profesi melaut diidentikan dengan profesi yang kurang menguntungkan, buruh kasar dan berpenghasilan rendah. Hal tersebut juga terungkap dari pernyataan BR seorang nelayan yang enggan menyekolahkan anaknya di sekolah pelayaran atau kelautan. “kalau mau melaut tidak usah sekolah saja mas, langsung seperti saya tidak pernah sekolah bisa langsung melaut, mau cari ikan apa ngangkut penumpang”, Anak saya, saya sekolahkan biar bisa jadi orang kantoran, polisi atau pegawai Bank. Hal ini karena menurut pandangan mereka, kerja kantoran, polisi, atau pegawai bank lebih memiliki kepastian hidup dari pada sebagai seorang nelayan. Menurut mereka, jadi nelayan itu tidak memiliki uang pensiunan di hari tua. Kalau sudah tidak kuat melaut, hidupnya susah, karena tidak ada yang memberi jaminan pendapatan. Sehingga, profesi nelayan bagi masyarakat nelayan pada umumnya adalah profesi keterpaksaan bagi mereka. Sementara bagi nelayan yang memilih menyekolahkan anaknya ke SMK pelayaran juga punya harapan agar anaknya dapat bekerja di kapal pesiar, bukan sebagai pelaut yang mampu mengembangkan potensi sumber daya hasil laut.

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh ibu LN, “jadi nelayan itu penghasilannya kecil mas”. “Demi mencari ikan, suami saya harus pergi melaut meninggalkan anak istri

selama 1 bulanan. Setiap bulannya, suami saya berada di rumah hanya beberapa hari saja, sebagian hidupnya lebih banyak dihabiskan hidup di atas laut untuk mencari ikan.” Bekerja menjadi nelayan memang pada kenyataannya kurang menguntungkan bagi keluarga mereka. Hasil survey pada anak-anak di kampung nelayan menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak nelayan hanya mampu mengenyam pendidikan pada tingkat SMP, bahkan sebagian lagi hanya mengenyam pendidikan pada tingkat SD. Hanya sebagian kecil dari anak-anak nelayan yang mampu mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA. Apalagi yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, bisa dibilang hampir tidak ada.

Kurikulum di SMK masih sentralistik. Jurusan Teknologi Pangan, yang dibutuhkan untuk mengolah produk hasil kelautan belum ada. Lulusan SMK bidang pelayaran yang sebetulnya sudah sangat kompeten, belum bisa diakui secara langsung. Hal ini karena untuk bisa bekerja diperkapalan harus mengikuti sertifikasi dari dinas perhubungan, dan biayanya cukup mahal bagi anak-anak nelayan yang notabennya termasuk golongan ekonomi kurang mampu. Serifikasi sebagai awak kapal sendiri lebih cenderung dikapitalisasikan. Dimana anak lulusan SMP bisa lebih berhak menjadi awak kapal dengan hanya mengantongi sertifikat dari dinas perhubungan yang ditempuh hanya beberapa hari. Sementara lulusan SMK yang melalui proses pendidikan 3 tahun justru tidak bisa langsung diakui kompetensinya. Di bidang usaha hasil laut, kurikulum SMK yang ada belum mampu memberikan kompetensi siswa terkait penciptaan pasar, pemasaran, dan bagaimana membangun jaringan agar mampu menyediakan produk secara berkelanjutan (Salah satu kegagalan pengusahaan lokal dalam menembus pasar adalah ketidakmampuannya dalam menyediakan stok produk secara berkelanjutan).

3. Kurikulum SMK Daerah Beranda Depan

Kabupaten Natuna merupakan wilayah perbatasan. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna Utara; sebelah timur dengan Laut Natuna Utara dan wilayah Serawak, Negara Malaysia; sebelah selatan dengan Kabupaten Bintan; dan sebelah barat dengan wilayah

Semenanjung Malaysia, Negara Malaysia. Wilayah Laut Natuna Utara merupakan wilayah perairan internasional, sehingga banyak dilayari kapal-kapal dari negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina. Posisi Kabupaten Natuna yang secara geografis dikelilingi negara-negara lain, terutama Malaysia, menyebabkan masyarakat di kabupaten ini banyak berinteraksi dengan negara-negara tetangga, terutama dalam aktivitas perdagangan tradisional. Kondisi ini mendorong SMK Negeri I Bunguran Timur menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Untuk itu pendidikan yang diberikan kepada para siswa harus bersifat semi semi militerisme. Untuk mewujudkan pendidikan yang semi militerisme tersebut, para siswa harus bersedia ditempatkan di asrama dan diwajibkan mengikuti peraturan-peraturan kedisiplinan di asrama. Namun saat ini anggaran untuk pengelolaan asrama dikurangi, sehingga pendidikan semi militer juga tidak dapat diterapkan. Akibatnya, anak-anak menjadi tidak mandiri dan kedisiplinannya rendah.

Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah kepulauan, sebagian besar masyarakat bermatapencaharian sebagai nelayan. Hal ini yang mendasari jurusan-jurusan yang dikembangkan di SMK ini berkaitan dengan dunia kemaritiman. Namun lulusan SMK ini tidak dilengkapi dengan sertifikat keahlian sesuai dengan jurusannya. Padahal sertifikat tersebut sangat dibutuhkan untuk bekal untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keahlian tersebut. Hal ini menyebabkan banyak lulusan yang menganggur. Berkaitan dengan permasalahan sertifikasi tersebut, hal tersebut kurang direspon oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Hal ini disebabkan para pemangku kepentingan (baik anggota DPRD maupun pejabat pemerintah di kabupaten) tidak mengerti akan pentingnya sertifikasi tersebut.

Dahulu pengelolaan anggaran untuk SMA dan sederajat ditangani oleh pemerintah kabupaten/ kota. Saat itu SMK Negeri I Bunguran Timur mendapat anggaran yang cukup untuk mengelola asrama, termasuk untuk biaya makan sehari-hari para siswa. Namun setelah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dana untuk pengelolaan asrama menjadi menurun. Meskipun para siswa masih diasramakan, namun mereka tidak mendapatkan makan dan minum, sehingga orangtua yang harus membiayai keperluan makan sehari-hari anak-anak mereka di asrama. Kondisi ini menyebabkan banyak orangtua memutuskan untuk menarik kembali anak-anaknya, sehingga anak-anak mengalami putus sekolah. Kondisi ini juga menyulitkan pihak pengelola asrama untuk menerapkan

kedisiplinan para siswa dalam rangka menanamkan sikap patriotisme dan nasionalisme, yang merupakan sikap yang penting ditanamkan terutama untuk para siswa yang tinggal di wilayah perbatasan. Saat ini, akibat dari banyaknya siswa yang tidak lagi tinggal di asrama, maka porsi pendidikan semi militer sangat dikurangi. Saat ini “unsur pendidikan semi militer” hanya tersisa pada pakaian seragam siswa yang “menyerupai” seragam siswa di pendidikan militer.

Di Kabupaten Natuna tidak ada perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk kegiatan praktik lapangan tidak dilakukan di Natuna, melainkan dilakukan di daerah-daerah lain. Untuk jurusan Nautika, dilaksanakan di Juwana (Jawa Tengah); untuk jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dilaksanakan di Bogor (Jawa Barat); sedangkan untuk Agribisnis Perikanan dilaksanakan di Pontianak dan Lampung. Saat ini ada wacana, anak-anak yang mengikuti praktik lapangan di kota-kota tersebut hendaknya juga mendapat sertifikasi dari perusahaan-perusahaan tempat mereka magang dan praktik lapangan. Dengan demikian, setelah lulus mereka mempunyai sertifikasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

SMK kurang mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat karena dianggap tidak bergengsi dan dianggap tidak memberikan masa depan yang menjanjikan sehingga masyarakat lebih memilih menyekolahkan putra-putrinya di jenjang SMA ketimbang di SMK, terutama bagi masyarakat Kota di kabupaten Natuna. Hal ini menyebabkan siswa yang bersekolah di SMK merupakan siswa yang berasal dari kecamatan yang terletak pulau-pulau kecil di kabupaten Natuna seperti Midai, Serasan dan Subi. Siswa dengan kemampuan akademik rendah bahkan cenderung dibawah rata-rata menjadi ciri khas dari siswa SMK di kabupaten Natuna, bahkan kebanyakan berasal dari ekonomi menengah ke bawah yang berangkat dari spirit *dari pada tidak sekolah* maka menyekolahkan anak-anak mereka di SMK.

Seperti halnya dengan SMK N 1 Bunguran Timur yang merupakan SMK Maritim dengan 4 bidang keahlian yaitu Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknik Kapal Penangkap Ikan, Agribisnis Perikanan dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Walaupun memiliki potensi laut yang luar biasa di Kabupaten Natuna tidak serta merta membuat SMK Maritim menjadi pilihan karena tidak ada satu pun siswa yang berasal dari Kota Ranai yang merupakan ibu kota kabupaten Natuna dimana sekolah ini berada, namun seluruh siswa

SMK berasal dari pulau-pulau kecil di kabupaten Natuna. Semangat kemaritiman terlihat luntur dengan ketidak tertarikannya para generasi muda untuk terjun ke bidang kemaritiman/kelautan. Bahkan para orang tua lebih memilihkan untuk masuk ke jenjang SMA dan walaupun berasal dari keluarga nelayan tidak menghendaki anak-anak mereka menjadi nelayan karena berkembang anggapan tidak perlu sekolah (SMK) jika hendak menjadi nelayan. Kehidupan nelayan dianggap sebagai kehidupan yang tidak bergengsi dan lebih memilih bekerja di sektor perkantoran (pegawai).

Pola Pengembangan kurikulum SMK

Posisi Kabupaten Natuna yang terletak di daerah perbatasan mendorong SMK Negeri I Bunguran Timur menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Untuk itu pendidikan yang diberikan kepada para siswa harus bersifat semi militerisme dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air. Perwujudan dari pendidikan semi militerisme tersebut adalah dengan menempatkan para siswa di asrama dan diwajibkan mengikuti peraturan-peraturan kedisiplinan. Namun saat ini karena perubahan pengelolaan yang semula dibawah naungan propinsi menjadi naungan kabupaten berakibat pada berkurangnya anggaran untuk pengelolaan asrama, sehingga pendidikan semi militer juga tidak dapat diterapkan. Akibatnya, anak-anak menjadi tidak mandiri dan kedisiplinannya rendah.

Pola pengembangan kurikulum di SMK masih bersifat sentralistik, dimana sekolah hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum dari pemerintah. Kurang melibatkan pihak *stake holder* dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum, sehingga kompetensi lulusan SMK sedikit tertinggal dengan keinginan *stake holder* dan kurang berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi perkapalan berlangsung dengan sangat cepat, sehingga materi yang diajarkan di Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Teknik Kapal Penangkap Ikan senantiasa tertinggal dengan perkembangan teknologi perkapalan terkini. Hal ini nampak saat para siswa menempuh kegiatan praktik di perusahaan. Peran serta sekolah juga masih dirasakan kurang bersinergi dengan masyarakat nelayan sekitar sehingga kontribusi sekolah dianggap masih kurang memberikan pembaharuan dalam bidang kelautan di masyarakat.

Pengembangan kurikulum sekolah masih menunggu instruksi baik dari pusat maupun antar SMK kemaritiman di daerah lain. Sehingga potensi dan kultur daerah masih

sangat minim dalam kurikulum sekolah. Kurikulum muatan lokal yang sejatinya menjadi wadah yang menampung perkembangan pengetahuan, teknologi dan potensi daerah diterjemahkan secara berbeda oleh sekolah. Kurikulum muatan lokal yang diajarkan antara lain adalah Bahasa Jepang.

Tenaga pendidik yang dimiliki oleh sekolah tidak semuanya berasal atau memiliki latar belakang pendidikan seorang pendidik. Terutama pada mata pelajaran keahlian utama, para pengajar berasal dari para pekerja/profesional yang sebelumnya berprofesi dibidang perikanan/perkapalan. Hal ini menyebabkan pengembangan kurikulum yang dilakukan sekolah hanya pada tataran praktis tanpa melibatkan peran serta masyarakat dan potensi daerah.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan di lapangan, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan. Pertama, secara umum menyodorkan fakta bahwa kurikulum masih bersifat sentralistik, belum sesai dengan potensi daerah, *diversity of content* dokumen kurikulum masih rendah, keterlibatan atau partisipasi mitra strategis dalam masyarakat sekitar dalam pengembangan kurikulum masih rendah. Oleh karena itu kurikulum diversifikatif dan partisipatif masih belum berkembang pada SMK di seluruh Indonesia.

Terdapat kendala struktural dan kultural dalam upaya pengembangan kurikulum diversifikatif dan partisipatif. Kendal struktural itu antara lain: (1) Implementasi kurikulum dalam KBM sangat dikontrol oleh aturan yang rigid; (2) Kreativitas guru dalam pengembangan kurikulum terhambat oleh aturan sertifikasi guru yang tidak kompatibel dengan pengembangan kurikulum yang diversifikatif dan partisipatoris; (3) Terjadi Ego sektoral antar istitusi pemerintah dalam pemberian kewenangan sertifikasi; dan (4) Tidak ada regulasi yang menjadi payung hukum untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan kurikulum

Kultural

Sementara itu kendala kultural dalam upaya pengembangan kurikulum diversifikatif dan partisipatif antara lain: (1) Berkembang persepsi dalam masyarakat bahwa pengembangan kurikulum merupakan tugas sekolah; (2) Hanya sedikit guru Guru yang berpotensi menjadi agent pengembangan kurikulum diversifikatif dan partisipatoris; dan (3)

Kepedulian guru terhadap pengembangan kurikulum diversifikatif masih rendah. Oleh karena itu cita-cita pendidikan yang sesuai dengan Nawacita masih menemui kendala serius baik sentralisme kurikulum maupun kendala struktural dan kultural.

Kedua, beberapa temua yang berkait dengan upaya pengembangan kurikulum diversifikatif dan partisipatoris, pada SMK dalam masyarakat agraris, maritime, dan beranda depan secara rinci adalah sebagai berikut:

Upaya pengembangan kurikulum diversifikatif pada SMK berkultur agraris menyodorkan beberapa permasalahan, antara lain:

- Kurikulum banyak titipan materi yang mengurangi frekuensi pelajaran pokok yang membentuk kompetensi keterampilan
- Kurikulum kurang cepat menyesuaikan dengan perkembangan actual pasar komoditi pertanian
- Muatan diversifikatif kurang, mala cenderung diseragamkan dengan SMA
- Kurikulum bermuatan pengetahuan yang mengembangkan potensi daerah misal budidaya jagung manis
- Kurikulum bersifat paket dari pusat, peluang pengembangannya hanya pada metodenya.

Sementara itu upaya pengembangan kurikulum diversifikatif pada SMK berkultur maritim menyodorkan beberapa persoalan sebagai berikut:

- Dokumen kurikulum tidak mendorong pengembangan masyarakat berkultur maritim yang industrial
- Lulusan SMK memilih pekerjaan ke bidang perniagaan yang didukung kompetensi minor.
- Ego sekoral antar kementrian dalam kewenangan/otoritas sertifikasi (politik perijinan)---komodifikasi perijinan...implikasi muncul distrust institusi sekolah...
- Pengembangan kurikulum kurang melibatkan *stakeholder* dan dunia usaha serta industri (DUDI).

Sedangkan upaya pengembangan kurikulum diversifikatif pada SMK beranda depan menyodorkan bererapa persoalan, antara lain:

- Content kurikulum masih konstruksi pusat yang dipandang sebagai wilayah pinggiran dan berimplikasi sebagai daerah pinggir, tertinggal)
- Dokumen kurikulum Natuna belum menjadikan warga beranda depan sebagai subyek aktif yang turut mengkonstruksi identitas ke Indonesiaan
- Content kurikulum tidak cukup berkontribusi terhadap pengembangan potensi daerah beranda depan
- Pengembangan kurikulum kurang melibatkan *stakeholder* (DUDI) sehingga kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh DUDI

REKOMENDASI

- Perlu regulasi, kebijakan dan program yang mengontrol secara ketat agar DUDI menggunakan lulusan SMK.
- Perlu pengembangan kurikulum berbasis kultur maritim dan agraris dengan perimbangan konten 60% sesuai dengan potensi daerah dan 40 % dari pusat.
- Perlu regulasi yang menjadi payung hukum untuk melibatkan masyarakat dan *stake holder* dalam pengembangan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, 1970, "The Idea of Power in Java," dalam: Claire Holt & James T. Siegel (eds.) *Cultures and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2010. Laporan BSNP Tahun 2010. Jakarta: BSNP. Makalah Disampaikan dalam Pembekalan Pelatih Nasional Kurikulum 2013 di Grand Topic Hotel. Jakarta: Kemdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kurikulum dan HasilBelajar. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
- Nasir, M. 2013. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan Islam di Madrasah. Hunafa: Jurnal Studia Islamika.
- Sutjipto. 2015. Diversifikasi Kurikulum dalam Kerangka Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 21 (3).
- Sutjipto. 2011. Bantuan Teknis Profesional Pengembangan Kurikulum kepada Tim Pengembang Kurikulum Daerah sebagai Wahana Pemberdayaan Staf Pusat Kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 17 (3).
- Wina Sanjaya. 2010. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Kencana.
- Nana Syaodah Sukmadinata. 2014. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gall, M.D., & Borg, W.R. (2003). *Educational Research: An Introduction (7th ed.)*. Boston: Allyn-Bacon.
- Horststmann Alexander, and Reed L. Wadley, 2006, *Centering the Margin: Agency and Narrative in Southeast Asian Borderlands*, New York: Berghahn Books.
- Hasbullah. 2010. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, S. H. 2013. Kecenderungan dan Perubahan Pola Pikir untuk Memahami Kurikulum 2013.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2006. *Community Development: Community-Base Alternative in Age of Globalisation*. Australia: Pearson Education.
- Lubis, M. S. 2011. Telaah Kurikulum. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Ditjen Otda.
- Marsetio, 2012, Konstruksi Marginalitas Daerah Perbatasan: Studi Kasus Kepulauan Natuna, *Disertasi*, Yogyakarta: Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana UGM.
- Nawawi Hadari. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nani Sudarsono. (2000). *Pembangunan Berbasis Rakyat*. Jakarta: YMBP-RBI. Nasir, M. 2013. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan Islam di
- Oakley, A. 1991. Project with People: The Practice of Participation in Rural Development. Geneva: ILO.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sayuti Hasibuan. (2000). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia
- Tilaar, H.A.R. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. 2011. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung: Grasindo.
- Tirtosudarmo, Riwanto, 2010, *Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: LIPI Press.
- S. Bayu Wahyono, dkk. 2014. Indeks Etos Belajar. Laporan Penelitian: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.